



Research Article

Koordinasi Penanggulangan Stunting di Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah

Siti Sarah¹, Sry Muyanita², Mahyudin³

1. Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
E-mail: sitisarah02176@gmail.com 
2. Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
E-mail: srymayunita@mail.com
3. Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
E-mail: mahyuddinfaith2018@mail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 03, 2026

How to Cite: Siti Sarah, Sry Muyanita and Mahyudin. (2026) "Coordination of Stunting Prevention and Mitigation in East Mawasangka District, Central Buton Regency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1492–1507. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.2402.

Coordination of Stunting Prevention and Mitigation in East Mawasangka District, Central Buton Regency

Abstract. Stunting is one of the major public health issues that requires comprehensive handling through effective coordination among various stakeholders. This study aims to examine the coordination efforts for stunting prevention in Mawasangka Timur Subdistrict, Central Buton Regency. The research method focuses on analyzing coordination using three main indicators: Agency Effort, Unity of Action, and Common Purpose. The results of the study show that relevant agencies such as the Community Health Center (Puskesmas), the Health Department, and posyandu (integrated health

service post) cadres have undertaken various efforts to combat stunting. These include the formation of coordination teams, public outreach, child growth monitoring, and improvement of health services. However, challenges remain, such as overlapping duties, lack of synergy, and limited resources. Unity of action is reflected through active collaboration between village midwives and posyandu cadres in health education, data recording, growth monitoring, and early reporting. A common purpose is demonstrated through coordination between health workers, village governments, and active community participation in nutritional education, child development monitoring, and empowerment of mothers with toddlers. Despite facing obstacles such as low public awareness and limited facilities, the presence of harmonious coordination and open communication among stakeholders shows a strong effort to align actions towards a shared goal of reducing stunting rates and ensuring a healthy, stunting-free generation of children.

Keywords: Coordination, Mitigation, Stunting

Abstrak. Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan komprehensif melalui koordinasi yang efektif antar berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. Metode penelitian yang digunakan berfokus pada analisis koordinasi dengan menggunakan tiga indikator utama yaitu Agency Effort (usaha instansi), Unity of Action (kesatuan tindakan), dan Common Purpose (tujuan bersama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi terkait seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan kader posyandu telah melakukan berbagai usaha dalam penanggulangan stunting melalui pembentukan tim koordinasi, sosialisasi, pemantauan pertumbuhan anak, serta peningkatan pelayanan kesehatan. Namun, masih ditemukan kendala berupa tumpang tindih tugas, kurangnya sinergi, dan keterbatasan sumber daya. Kesatuan tindakan tercermin melalui kerja sama aktif antara bidan desa dan kader posyandu dalam edukasi, pencatatan data, pemantauan pertumbuhan anak, dan pelaporan dini. Tujuan bersama ditunjukkan melalui koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan ibu balita. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas, koordinasi yang harmonis dan komunikasi terbuka antar pihak menunjukkan upaya menyelaraskan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam menekan angka stunting dan mewujudkan generasi anak-anak yang sehat dan bebas dari stunting.

Kata Kunci: Koordinasi, Penanggulangan, Stunting

PENDAHULUAN

Secara global, stunting menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia berproses mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target yang termasuk di dalamnya adalah penanggulangan masalah stunting yang diupayakan menurun pada tahun 2025. Tujuan ke-2 ini berkaitan erat dengan tujuan ke-3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di kabupaten buton tengah. Menurut data dari badan pusat statistik (BPS) kabupaten buton tengah, prevalensi stunting pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di kecamatan mawasangka timur masih relatif tinggi yaitu sebesar 27,3% pada tahun 2020.

Pemerintah kecamatan mawasangka timur telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi stunting, termasuk melalui program penanganan stunting yang di laksanakan oleh puskesmas mawasangka timur, namun hasil evaluasi program tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu di atasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terkait (Dinas kesehatan kabupaten buton tengah 2020).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program penanganan stunting pemerintah kecamatan mawasangka timur telah melakukan revisi kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek, seperti peningkatan keterlibatan masyarakat, peningkatan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait, dan peningkatan ketersediaan sumber daya (peraturan bupati buton tengah nomor 12 tahun 2020) tentang kesehatan.

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian kesehatan dalam SDGs (Sustainable Development Goals) adalah status gizi anak balita. Masa anak balita merupakan kelompok yang rentan mengalami kurang gizi, salah satunya adalah Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting berakibat pada rendahnya tinggi badan anak dibandingkan dengan usia, dan dapat memengaruhi perkembangan fisik serta kognitif mereka.

Secara global kejadian stunting masih sangat tinggi termasuk di Indonesia. Stunting menjadi isu utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat, karena berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada produktivitas jangka panjang. Indonesia sebagai Negara berkembang masih memiliki tingkat prevelensi stunting tinggi. Menurut riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 angka prevelensi.

Stunting tercatat 8,7 juta (30,7%) bayi berumur bawah lima tahun (balita) mengalami stunting. Angka ini masih jauh dari angka target yang di tetapkan Oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya angka stunting tidak lebih dari 20%.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah peluncuran Rencana Aksi Nasional Percepatan. Penurunan Stunting di kecamatan mawasangka timur kabupaten buton tengah menggunakan data nasional. Data prevelensi stunting.

Berdasarkan data prevelensi stunting di kabupaten buton tengah menunjukkan bahwa, prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel.1 Data Prevelensi Stunding di Kabupaten Buton Tengah

No.	Tahun	Prevelensi Stunting
1	2020	27,0%
2	2021	23,4%
3	2022	22,3%
4	2023	15,7%

Sumber: (Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah, 2023)

(RAN-PS) yang menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Pada 2023 angka stunting secara nasional tercatat 21,5 persen mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dari tahun 2022 yaitu 21,6 persen.

Keterlibatan berbagai pihak atau koordinasi sebagai upaya yang sangat diperlukan bagi percepatan penurunan stunting. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang tujuan peraturan presiden untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas hidup anak peningkatan akses dan kualitas, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, diterbitkannya peraturan tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi strategi nasional percepatan penurunan stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program dalam menekan angka stunting, pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional 5 Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia sebagai upaya pemerintah pusat mengkonsolidasikan atau mengkonvergensi kegiatan-kegiatan, program dan anggaran yang termasuk didalamnya terdapat pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan serta sektor swasta.

Terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia yaitu pertama dengan pendekatan keluarga beresiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu yaitu pencegahan lahirnya bayi stunted dan penanganan balita stunting. Kedua, melalui pendekatan multisektor dan multipihak melalui PENTAHILIX yaitu menyediakan platform kerjasama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan (dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media). Ketiga, pendekatan intervensi gizi terpadu dengan melakukan intervensi spesifik dan sensitif yang berfokus pada program inkubasi yang memperhatikan kesehatan dan kecukupan gizi 3 bulan calon pengantin, ibu hamil, ibu masa interval, baduta dan balita di dukung dengan penyediaan sanitasi, akses air bersih serta bansos.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kementerian kesehatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara sebesar 3,7 persen di tahun 2022 dari 31,4 persen di tahun 2019. Sementara berdasarkan data aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM).

Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perbedaan yang cukup besar, pada tahun 2022 sebesar 16,2 persen, turun menjadi 11,3 persen pada

tahun 2022, pada tahun 2023 perbulan November sebesar 10,5 persen dan tahun 2024 bulan juni mengalami peningkatan menjadi 11,05 persen.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di Kabupaten Buton Tengan pada tahun 2021 prevelensi stunting sebesar 23,5 persen yang kemudian mengalami penurunan sebesar 12,1 persen pada tahun 2022 menjadi 22,4 persen, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan yakni sebesar 6,7 persen menjadi 15,7 persen dan pada tahun 2024 prevensi stunting di Kabupaten Buton Tengah mengalami penurunan sebesar 1,1 persen menjadi 14,4 persen.

Tabel. 2 Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di Kabupaten Buton Tengan

No.	Tahun	Prevelensi Stunting
1	2021	23,5% yang mengalami penurunan sebesar 12,1%
2	2022	22,4%
3	2023	6,7%
4	2024	12,1%
5	2025	14,4%

Sumber: (Kementerian Kesehatan RI, 2024)

Koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan cara yang strategis dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kejadian stunting disebabkan oleh berbagai aspek. Upaya percepatan penanganan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Dalam aksi konvergensi itu membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Meskipun berbagai instansi mempunyai tugasnya masing-masing, tetapi masih diperlukan kerjasama atau koordinasi karena ada tanggung jawab tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa ada campur tangan instansi lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya belum tentu seperti itu yang ditunjukkan dengan perilaku setiap perangkat kerja cenderung hanya melihat sarannya sendiri. Koordinasi merupakan titik kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang membutuhkan perhatian lebih.

Koordinasi dari berbagai instansi atau stakeholder sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penanganan stunting. Sebagai contoh misalnya Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting, BKKBN melakukan peningkatan promosi pengasuhan 1.000 HPK, DP3A melakukan sosialisasi terkait gizi seimbang. Di tingkat Kecamatan, camat melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan stunting, sedangkan Perguruan Tinggi memiliki peran ganda untuk menangani stunting sebagai sumber ilmu pengetahuan, penelitian dan kajian.

Wilayah Kabupaten Buton Tengah terdiri dari 7 Kecamatan dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 14 Puskesmas terdiri dari 7 Puskesmas Induk dan 7 puskesmas Satelit. Kabupaten Buton Tengah menurut

Kecamatan mengalami fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Tren angka Stunting per kecamatan memperlihatkan bahwa kecamatan yang paling tinggi penurunan prevalensi stuntingnya terjadi pada Kecamatan Mawasangka Timur sejak tahun 2021 yaitu sebesar 12,8 persen pada tahun 2022 menjadi 2,3 persen pada tahun 2023 menjadi 16,4 persen pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan penurunan prevelensi stunting di Kecamatan Mawasangka Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya. Kondisi ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, sehingga penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur mencapai angka stunting dibawah standar nasional yakni 14 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur. Lemahnya koordinasi menyebabkan tidak tercapainya sinergi yang optimal dalam pelaksanaan program, sehingga berdampak pada lambatnya penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana koordinasi dilakukan dalam penanggulangan stunting serta sejauh mana koordinasi tersebut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme koordinasi lintas sektor guna mendukung upaya percepatan penanggulangan stunting secara efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Mawasangka Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Koordinasi

Secara etimologi kata koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan mengatur bersama atau menyepakati hal tertentu. Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyaksikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang di tetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesailisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndaraha 2015:290).

Secara luas koodinasi diartikan oleh Leonard dalam (Fatahilah 2019:65) bahwa "Kordinasi adalah penyesuain diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang tepat sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbentuknya pada keseluruhan hasil".

Menurut Terry dalam (Harahap et al., 2020:6) berpendapat bahawa koordinasi adalah suatu usaha yang singkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif.
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut.

3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut.

Koordinasi di perlukan dalam pekerjaan tim untuk menggerakkan dan mengimbangi tim dengan memberikan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing anggota dan menjaga agar kegiatan dilaksanakan dengan keselarasan.

Menurut Hasibuan, Malayu. S. P (2014) koordinasi merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga saling dapat melengkapi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat didefinisikan bahwa koordinasi merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam suatu pekerjaan.

Faktor-Faktor Koordinasi

Menurut Hasibuan (2014), koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi, di mana pimpinan harus mampu menyatukan setiap usaha individu agar selaras dalam mencapai tujuan bersama, termasuk melalui pengaturan waktu yang terencana. Komunikasi juga menjadi unsur vital dalam koordinasi, karena melalui komunikasi yang efektif, partisipasi anggota organisasi dapat ditingkatkan dan tugas dapat disampaikan secara jelas. Selanjutnya, pembagian kerja memungkinkan setiap individu memiliki tanggung jawab atas tugas tertentu, sehingga proses kerja dapat berjalan efisien dan terarah. Disiplin juga sangat diperlukan agar setiap bagian dalam organisasi dapat berkontribusi secara maksimal sesuai perannya. Stoner turut mengemukakan empat dimensi koordinasi yang efektif, yaitu komunikasi, kerja sama, sinkronisasi, dan integrasi. Komunikasi berperan dalam pengelolaan informasi, kerja sama memastikan sinergi antarpihak, sinkronisasi menyesuaikan kegiatan agar tidak tumpang tindih, dan integrasi mengarahkan tindakan agar harmonis dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Farland dalam Manoppo (2017:56) menambahkan bahwa pencapaian koordinasi dalam organisasi juga sangat ditentukan oleh kejelasan kewenangan dan tanggung jawab, pengawasan yang seksama, fasilitas komunikasi yang efektif, serta kemampuan kepemimpinan yang memadai.

Definisi Stunting

WHO (World Health Organization) mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (-2SD) pada kurva pertumbuhan WHO dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK (WHO, 2020).

Menurut Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), stunting adalah suatu kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi dan tidak mendapat asupan gizi yang cukup dalam jangka waktu lama sehingga mempengaruhi tumbuh

kembang anak seperti tinggi badan yang berarti lebih pendek dari standar usia anak pada umumnya. Stunting sendiri merujuk pada kondisi di mana perkembangan fisik dan pertumbuhan seorang anak mengalami hambatan jika dibandingkan dengan anak sebayanya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting, Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau ukuran tubuh di bawah standar yang ditentukan Kemenkes RI. stunting diidentifikasi ketika tinggi badan anak berada di bawah lima persen dari standar tinggi badan normal yang seharusnya sesuai dengan usianya (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

Stunting didefinisikan sebagai indikator status gizi tinggi badan menurut umur (TB/U) sama dengan atau kurang dari minus dua standar deviasi (-2 SD) di bawah rata-rata dari standar. Menurut Sulistyawati, stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek malampaui deficit -2 SD di bawah median yang panjang atau tinggi badan (Agus Byna, 2020:6).

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terganggu sehingga tinggi badannya lebih rendah dari standar usianya. Ini biasanya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan, terutama dalam seribu hari pertama sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Stunting dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas seseorang di masa depan (Abdussamad & Hurudji, 2022).

Faktor Penyebab Stunting

Stunting pada anak merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Munir Zainal (2021), salah satu penyebab utama stunting adalah malnutrisi, khususnya kekurangan gizi sejak dalam kandungan akibat tidak tercukupinya asupan nutrisi selama kehamilan. Selain itu, pemberian ASI eksklusif yang tidak sesuai serta pola asuh yang kurang tepat, khususnya dalam praktik pemberian makan, turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi, yang biasanya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan, juga berdampak pada kemampuan ibu dalam merawat kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Faktor ekonomi menjadi aspek penting lainnya, di mana pendapatan keluarga yang rendah menyebabkan keterbatasan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, sehingga anak kesulitan melakukan pertumbuhan yang optimal. Kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, terutama akses terbatas terhadap air bersih, meningkatkan risiko infeksi seperti diare dan parasit usus, yang pada akhirnya memperburuk status gizi anak. Penyakit infeksi yang terjadi secara berulang juga dapat menurunkan nafsu makan dan kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi secara optimal, menyebabkan gangguan pertumbuhan. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat dalam pola pengasuhan dan pemahaman tentang gizi turut berpengaruh dalam pencegahan stunting. Meskipun tidak dapat diubah, faktor genetik dan keturunan juga memiliki peran dalam menentukan tinggi badan dan perkembangan fisik anak. Oleh karena itu, pencegahan stunting memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup intervensi gizi, edukasi, perbaikan sanitasi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan survei yang dilakukan untuk melihat dan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi didalam masyarakat (Notoatmodjo, 2017). Penelitian kualitatif berfungsi untuk memberikan makna secara mendalam tentang fakta yang terjadi dalam suatu kejadian.

Tujuan analisis deskriptif ini adalah yang bertujuan untuk mengetahui gambaran secara langsung mengenai Koordinasi penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang bersifat primer yaitu data yang didapat dari observasi langsung pada tempat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun dalam koordinasi antara Puskesmas, Posyandu, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, peneliti menggunakan unsur-unsur koordinasi untuk mengetahui sejauh mana efektifitas koordinasi yang dilakukan antar pihak tersebut, sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafie (2011: 34) sebagai berikut:

Agency Effort (Usaha Instansi) dalam Penanggulangan Stunting

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan di dalam organisasi atau instansi, bukan terhadap usaha individu. Maka sejumlah individu yang bekerja di bawah satu institusi, dengan melakukan koordinasi, menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam pelaksanaan tugas-tugas, dan lemahnya sinergi merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

Koordinasi dan hubungan kerja sama merupakan dua hal yang saling terkait. Koordinasi hanya dapat tercapai jika terdapat hubungan kerja yang efektif antar unit atau individu dalam suatu instansi. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administratif yang mendukung tercapainya koordinasi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi yang baik adalah terwujudnya koordinasi yang berdaya guna efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Mawasangka Timur, yang menyatakan bahwa:

“Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan stunting, mengadakan rapat evaluasi secara berkala untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam penanggulangan stunting, serta menentukan strategi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan stunting melalui kegiatan seperti posyandu, posbindu, dan kegiatan lainnya.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengatakan bahwa Kepala Puskesmas telah membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan stunting di wilayah Kecamatan Mawasangka Timur. Tim ini secara

aktif mengadakan rapat evaluasi secara berkala guna membahas kemajuan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang tepat dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting. Selain itu, Puskesmas juga berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti posyandu, posbindu, dan program kesehatan lainnya. Langkah ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam mewujudkan upaya yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan stunting.

Puskesmas juga berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti posyandu, posbindu, dan program kesehatan lainnya. Langkah ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam mewujudkan upaya yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan stunting.

Kepala Puskesmas Mawasangka Timur juga menyatakan bahwa koordinasi penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur telah dilakukan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Puskesmas telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat dalam penanggulangan stunting. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa peran Puskesmas dalam penanggulangan stunting adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dan penyuluhan tentang pencegahan serta penanggulangan stunting. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kualitas gizi anak-anak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Mawasangka Timur juga sejalan dengan arahan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penanganan stunting secara terintegrasi. Meskipun demikian, Kepala Puskesmas juga mengakui adanya beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Namun, beliau menegaskan bahwa rencana ke depan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas gizi anak, serta pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara lebih intensif.

Unity of Action (Kesatuan Tindakan) dalam Penanggulangan Stunting

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Kesatuan tindakan menekankan pada pentingnya setiap pihak untuk tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menyesuaikan diri dan mendukung tugas satu sama lain. Koordinasi yang baik akan menghindari terjadinya tumpang tindih dan memastikan kelancaran program lintas peran.

Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi dalam upaya penanggulangan stunting, di mana setiap instansi atau unit pelaksana harus memiliki

pemahaman yang sama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin pada tingkat Puskesmas maupun lintas sektor perlu mengatur dan menyelaraskan usaha setiap individu atau unit kerja sehingga tercipta keserasian dalam pelaksanaan program. Kesatuan tindakan juga menuntut adanya pembagian tugas yang jelas, penjadwalan kegiatan yang terintegrasi, serta komunikasi yang terbuka antar pihak terkait. Di dalam pelaksanaannya pemimpin juga harus memiliki kreativitas dan inisiatif untuk membangun kesadaran seluruh pihak akan pentingnya bekerja secara terpadu. Kreativitas di sini diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru atau solusi atas kendala yang dihadapi dalam koordinasi lintas sektor. Sementara itu, inisiatif menjadi modal penting untuk mendorong sinergi dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan.

Dari hasil wawancara terkait kesatuan tindakan peneliti mewawancarai bidan desa yang menyatakan bahwa:

“Kami biasanya memberikan edukasi dan penyuluhan kepada kader posyandu dan juga masyarakat, supaya mereka paham apa itu stunting, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Kami juga rutin bekerja sama dengan kader untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Jadi kalau ada yang mulai terlihat gejala stunting, bisa cepat diketahui dan ditangani. Selain itu, kami juga selalu berkoordinasi dengan kader untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di posyandu, dan memantau serta mengevaluasi bagaimana jalannya program penanggulangan stunting.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengatakan bidan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesatuan tindakan dalam program penanggulangan stunting. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif bidan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada kader posyandu dan masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai stunting, penyebabnya, serta langkah-langkah pencegahannya. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dan terkoordinasi, mencerminkan adanya sinergi antar pihak dalam menjalankan program.

Bidan desa menjelaskan bahwa mereka telah menghadapi beberapa kasus balita stunting di wilayah Kecamatan Mawasangka Timur, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan dan setelah kelahiran. Pengalaman ini memperkuat pentingnya peran bidan tidak hanya dalam edukasi, tetapi juga dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin, sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi stunting. Namun dalam pelaksanaan tugas, bidan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi serta keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga maupun fasilitas pendukung. Meskipun demikian, bidan tetap berupaya menjaga koordinasi dengan kader posyandu serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap jalannya program, guna memastikan bahwa setiap pihak menjalankan perannya dengan baik.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kader Posyandu, menyatakan bahwa:

“Kami biasanya mencatat data pertumbuhan dan perkembangan anak-anak setiap kali ada penimbangan di posyandu. Kalau ada anak yang berat badannya tidak naik atau ada tanda-tanda stunting, kami langsung laporkan ke bidan desa. Kami juga

sering diajak kerja sama oleh ibu bidan untuk sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya gizi, terutama untuk ibu hamil dan ibu yang punya balita.”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti mengatakan bahwa kader posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penanggulangan stunting di tingkat desa. Hal ini tercermin dari keterlibatan kader dalam proses pencatatan data pertumbuhan dan perkembangan anak, yang menjadi dasar deteksi dini terhadap kasus stunting. Kader juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya bidan desa, dengan melaporkan temuan lapangan secara langsung. Selain itu, kader posyandu turut berperan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi, terutama bagi ibu hamil dan ibu balita. Kerja sama yang terjalin antara kader dan bidan desa menunjukkan adanya kesatuan tindakan yang harmonis, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya secara aktif dan saling melengkapi. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu serta efektivitas program penanggulangan stunting di wilayah Kecamatan Mawasangka Timur.

Kesatuan tindakan dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur tampak melalui koordinasi yang terjalin antara bidan desa dan kader posyandu. Bidan desa secara aktif melaksanakan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta kader posyandu mengenai stunting, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Selain itu, bidan juga melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, sebagai bagian dari deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya stunting. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara terkoordinasi bersama kader posyandu, yang turut berperan dalam pencatatan data anak serta melaporkan kondisi yang mengarah pada stunting kepada bidan. Kegiatan yang dilakukan oleh bidan dan kader ini menunjukkan adanya kerja sama lintas peran, di mana masing-masing pihak saling mendukung dan menyesuaikan tugas demi kelancaran program. Koordinasi tersebut juga mencakup evaluasi berkala untuk memantau sejauh mana program berjalan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, bidan menghadapi beberapa tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan keterbatasan fasilitas atau tenaga pendukung. Meskipun demikian, upaya menjaga komunikasi terbuka dan kolaborasi yang kuat terus dilakukan. Dari sisi kader posyandu, peran mereka tidak hanya terbatas pada pelaporan data, tetapi juga ikut serta dalam penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu balita. Mereka menjadi perpanjangan tangan bidan di lapangan, menjembatani antara pelayanan kesehatan dan masyarakat desa. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa seluruh unsur yang terlibat memiliki pemahaman dan arah tujuan yang selaras, serta mampu menjalankan fungsinya secara terintegrasi dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting.

Common Purpose (Tujuan Bersama) dalam Penanggulangan Stunting

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai. Tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kelompok di mana mereka bekerja. Dalam hal ini, tujuan

bersama harus difokuskan pada instansi dan elemen masyarakat yang terlibat, seperti bidan desa, kader posyandu, dan masyarakat itu sendiri, dalam upaya penanggulangan stunting.

Keberhasilan koordinasi dapat dilihat dari sejauh mana setiap pihak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta pelaporan dini terhadap gejala stunting. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan posyandu juga menjadi indikator penting pencapaian tujuan bersama, yaitu memastikan anak-anak tumbuh dengan gizi yang cukup dan kondisi kesehatan yang optimal. Interaksi antar pihak yang selaras dengan pembagian tugas masing-masing menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Harmida mengatakan bahwa:

“Saya sangat berterima kasih atas upaya pemerintah dalam menangani stunting di Kecamatan Mawasangka Timur. Pelayanan kesehatan yang diberikan sangat baik terutama dengan adanya posyandu yang memberikan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui program posyandu, yang menjadi sarana utama dalam pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala sebagai bagian dari pencapaian tujuan bersama.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Widiyah mengatakan bahwa:

“Sebagai ibu saya sangat peduli dengan kesehatan dan gizi anak saya. Saya berusaha untuk memberikan makanan yang bergizi, seimbang, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein yang cukup.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengungkapkan bahwa peran aktif orang tua, khususnya ibu, dalam pemenuhan gizi anak merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap keberhasilan program penanggulangan stunting, yang mendukung tercapainya tujuan bersama antara masyarakat dan tenaga kesehatan.

Seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Sauma mengatakan bahwa:

“Saya sebagai ibu balita stunting saya berharap kepada pihak kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Saya berharap bahwa pihak kesehatan dapat memberikan edukasi yang lebih banyak tentang gizi yang tepat untuk anak-anak dan cara mencegah stunting.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengatakan bahwa masih terdapat harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan. Harapan ini menjadi refleksi penting bahwa pencapaian tujuan bersama tidak hanya bergantung pada koordinasi antar instansi, tetapi juga pada kesediaan untuk terus meningkatkan pelayanan dan edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan bersama dalam penanggulangan stunting adalah menciptakan generasi anak-anak yang sehat, tumbuh optimal, dan bebas dari masalah gizi kronis, yang hanya dapat dicapai melalui keterlibatan aktif seluruh elemen, baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri, khususnya para ibu yang memiliki

balita. Dalam pelaksanaan di lapangan, para ibu balita stunting menyampaikan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama karena keterbatasan ekonomi yang menyulitkan mereka untuk menyediakan makanan bergizi secara rutin. Meski begitu, sebagian besar dari mereka telah memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya gizi dan dampak serius dari stunting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Mereka mengetahui bahwa stunting dapat menghambat kecerdasan dan kesehatan anak dalam jangka panjang, namun tetap merasa perlu adanya edukasi lanjutan mengenai cara memberikan gizi yang cukup, terutama dengan bahan makanan lokal yang mudah dijangkau. Selain itu, para ibu juga menyampaikan harapan agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan lebih besar, baik dalam bentuk bantuan makanan bergizi, peningkatan layanan kesehatan, maupun penyuluhan yang lebih merata dan mudah diakses.

Keberhasilan dari tujuan bersama ini tidak hanya bergantung pada koordinasi antar instansi, tetapi juga pada bagaimana Masyarakat dalam hal ini ibu-ibu balita diberdayakan secara menyeluruh agar mampu mengambil peran aktif dalam upaya penanggulangan stunting, demi terciptanya anak-anak yang sehat dan masa depan bangsa yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Agency Effort (usaha instansi), Instansi terkait seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan kader posyandu telah melakukan berbagai usaha dalam penanggulangan stunting, seperti membentuk tim koordinasi, melakukan sosialisasi, pemantauan pertumbuhan anak, serta meningkatkan pelayanan kesehatan.
2. Unity of Action (kesatuan tindakan), Kesatuan tindakan dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Mawasangka Timur tercermin melalui kerja sama aktif antara bidan desa dan kader posyandu. Keduanya menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi, seperti edukasi, pencatatan data, pemantauan pertumbuhan anak, dan pelaporan dini terhadap gejala stunting.
3. Common Purpose (tujuan bersama), koordinasi yang dilakukan antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat melalui kader posyandu telah mengedepankan tujuan bersama, di mana setiap pihak yang terlibat diberikan pemahaman dan arahan agar dapat bekerja sama secara selaras dalam menanggulangi stunting. Tujuan bersama tersebut ditunjukkan melalui upaya edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan ibu balita dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Abdul Wahab, S. (2021). *Analisi Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Abdussamad, J., Hurudji, A., & Putri, W. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 9(2), 157–178.
- Agus Byna. (2020). Analisis Komparatif Machine Learning untuk Klasifikasi Kejadian Stunting. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Ama, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penata Laksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anisa, A., & Arifin, J. (2021). Implementasi Kebijakan Perbup No.18 Tahun 2021 (Perubahan Atas Perbup No.26 Tahun 2020) Dilihat dari Aspek Komunikasi di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Stiatalong, 4(18), 1270–1282.
- Awalla, Y., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertambaga Kota Bitung. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Dewi, D. C., dkk. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Fitri, L. (2018). Hubungan BBLR dan ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, 3(1), 131–137.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia.
- Munir, Z., dkk. (2021). Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Peningkatan Kasus Stunting pada Balita.
- Notoatmodjo, S. (2015). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2017). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- N. Yalmanov. (2021). Public Policy and Policy-Making. Dalam Culture, Persona, Society in the Conditions Of Digitalization: Methodology and Experience of Empirical Research Conference, KnE Social Sciences, 5(2), 558–564. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i2.8400>
- Prakoso, C. T. (2018). Model Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Samarinda. Jurnal Paradigma (JP), 7(3), 179–189. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/5228>
- Pujiastuti, T. B. S., Saptawan, A., & Purnama, D. H. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Kebijakan dan Manajemen Publik, 4(3), 1–8.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2021). Analisa Kebijakan Publik: Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif). CAPS (Center of Academic Publishing Server): PT Buku Seru.

WHO. (2020). Prevalensi Stunting pada Anak di Bawah 5 Tahun (%) (JME).